

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI BUMDES TERHADAP PELAYANAN KANTOR DESA CIPOTAKARI KECAMATAN PANCA RIJANG

¹⁾Andi Muhammad Husni Thamrin, ²⁾Andi Astinah Adnan, ³⁾Andi Uceng

^{1), 2), 3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

andihusnithamrin@gmail.com

andi.astinah.adnan@gmail.com

andiuceng@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi Sistem Informasi terhadap pelayanan publik Kantor Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor pendukung yang memengaruhi pelayanan publik Kantor Desa Cipotakari di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang ada di Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten jumlah masyarakat yang dilayani 2 Bulan terakhir yakni September-Desember 2020 sebanyak 85 Orang. Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sampel total, jadi semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama menjadi sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian digunakan cara teknik analisis kuantitatif dengan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan aplikasi Sistem Informasi Bumdes terhadap pelayanan publik Kantor Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan kurang baik dengan nilai 60,11%. Faktor pendukung yang memengaruhi pelayanan publik Kantor Desa Cipotakari di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yakni Faktor Kesadaran ditandai ketepatan waktu kerja aparatur di Kantor Desa Cipotakari dikategorikan baik dengan nilai 64,6%. Faktor Aturan ditandai pengaturan kerja pelayanan aparatur di Kantor Desa Cipotakari dikategorikan kurang baik dengan nilai 59,2%. Faktor Organisasi ditandai pembagian kerja pelayanan aparatur di Kantor Desa Cipotakari Cipotakari dikategorikan baik dengan nilai 64,8%. Faktor Pendapatan ditandai imbalan jasa layanan yang diberikan aparatur di Kantor Desa dikategorikan baik dengan nilai 65%. Faktor Kemampuan ditandai bimbingan pelayana aparatur kepada masyarakat di Kantor Desa Cipotakari dikategorikan baik dengan nilai 68%. Faktor Sarana ditandai fasillitas kerja aparatur dalam melayani masyarakat di Kantor Desa Cipotakari dikategorikan baik dengan nilai 64,5%.

Kata Kunci: Aplikasi SIBERAS, Pelayanan Publik

Abstract

This study aims to determine the application of the Bumdes Information System application and Village and Village Management to the public services of the Cipotakari Village Office, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency and the supporting factors that affect the public services of the Cipotakari Village Office in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. The population in this study is the head of the family in Aka-Akae Village, Watang Sidenreng District, the number of people served in the last 2 months, namely September-December 2020 as many as 85 people. The number of samples in this study was carried out by means of total samples, so all members of the population had the same opportunity to be samples. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, questionnaires and literature study. The collected data is then used quantitative analysis techniques with frequency tables. The results showed that the application of the Bumdes and Village and Village Management Information System applications to the public services of the Cipotakari Village Office, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency was categorized as poor with a value of 60.11%. The supporting factor that affects the public services of the Cipotakari Village Office in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency, namely the Awareness Factor marked by the punctuality of the work of the apparatus at the Cipotakari Village Office is categorized as good with a score of 64.6%. The rule factor is marked by the work arrangement for the apparatus service at the Cipotakari Village Office which is categorized as poor with a score of 59.2%. The income factor is marked by the compensation for services provided by

the apparatus at the Village Office which is categorized as good with a value of 65%. The ability factor is marked by the guidance of apparatus services to the community at the Cipotakari Village Office categorized as good with a score of 68%. The facility factor is marked by the work facilities of the apparatus in serving the community at the Cipotakari Village Office categorized as good with a score of 65.4%.

Keywords : SIBERAS Application, Public Service

A. PENDAHULUAN

Perbaikan kritis selama bertahun-tahun membuka jalan ke awal abad ke-21 dipisahkan oleh pentingnya perluasan penanganan data dan informasi di berbagai bagian keberadaan manusia. Sementara itu, di samping kecepatan peningkatan, semakin banyak asosiasi publik dan swasta yang dapat memanfaatkan inovasi data baru yang dapat mendukung kecukupan, kegunaan, dan kemahirannya. Kemajuan teknologi data, untuk situasi ini inovasi PC, dapat mendukung dinamika asosiasi masa kini yang memungkinkan pekerjaan di dalam organisasi dapat diselesaikan dengan tepat, tepat, dan efisien.

Para manajer sekarang ini dituntut kemampuan mereka untuk dapat memanfaatkan informasi yang membanjiri organisasi dan membuat keputusan secara tepat berdasarkan informasi tersebut. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, manajemen pemerintah daerah di Indonesia dilandasi Undang – Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip –prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Penataan kerangka kerja eksekutif dan metodologi kerja di dalam otoritas publik, pelaksanaan di dalam dan administrasi publik dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan inovasi data. Penggunaan inovasi data menggabungkan latihan yang saling terkait, khususnya penanganan informasi, data dewan, kerangka kerja eksekutif dan ukuran kerja secara elektronik. Oleh karena itu, pemanfaatan inovasi data dalam suatu asosiasi merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam siklus kerjanya sebagai suatu kerangka kerja.

Globalisasi mendorong pemanfaatan inovasi data di berbagai bidang bisnis. Kemajuan ini akhirnya mendorong otoritas publik untuk mempercepat pelaksanaan kerangka kerja yang disebut e-government (electronic government). Sebagaimana ditunjukkan oleh Ndraha (2003), pemerintahan yang dalam pandangan ilmu pemerintahan dicirikan sebagai kantor yang mampu menangani pemenuhan kebutuhan manusia sebagai klien sebagai barang atau administrasi, administrasi publik dan administrasi umum, saat ini dihadapkan pada berbagai isu-isu dasar yang sebenarnya merupakan tuntutan perubahan. organisasi dari pertemuan yang berbeda, dan khususnya permintaan untuk bekerja pada sifat administrasi publik. Otoritas publik benar-benar telah memberikan pedoman administrasi tentang e-government.

Laudon dan Laudon (2007:15) khusus kerangka data (data framework) dapat dicirikan sebagai sekelompok bagian yang saling berhubungan, mengumpulkan (atau memperoleh), interaksi, menyimpan dan menyampaikan data untuk membantu dinamis dan kontrol dalam suatu asosiasi. Selain mendukung siklus dinamis, koordinasi, dan pengawasan, kerangka kerja data juga dapat membantu perintis dan perwakilan dalam memecahkan masalah, menggambarkan masalah yang kompleks, dan membuat item baru. Dalam penerapannya pada suatu asosiasi, mengingat untuk administrasi, kerangka data mengacu pada data tentang individu-individu hierarkis, tempat-tempat dan hal-hal penting lainnya di dalam asosiasi atau dalam iklim umum. Data akan menjadi informasi yang telah dibentuk menjadi sesuatu yang memiliki arti dan bernilai bagi manusia. Lagi pula, informasi adalah sekumpulan realitas kasar (yang belum ditangani/ditangani) yang membahas kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu asosiasi sehingga tidak berhasil dilihat oleh orang-orang.

Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia,

mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

UU KIP dan semua pedoman bagi LSM Organisasi keamanan pembeli juga harus memiliki kepastian hukum Menawarkan jenis bantuan publik yang brilian adalah tujuan dari setiap pemerintah lingkungan. Pemerintah daerah saat ini sedang berjuang untuk menjalankan dan memanfaatkan teknologi dalam inovasi data untuk dapat membantu mewujudkannya. Penggunaan inovasi data menggabungkan latihan yang saling terkait, khususnya penanganan informasi, data dewan, dan kerangka kerja eksekutif. Peningkatan inovasi data dan penggunaan jaringan internet ke dalam administrasi pemerintahan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah melalui peningkatan kemampuan, kemajuan, kegunaan, jangkauan yang lebih luas, dan penghematan biaya.

Administrasi publik yang luar biasa mengejar arah di seluruh dunia, namun ditujukan untuk mengakui administrasi besar, khususnya administrasi besar, keterusterangan dan tanggung jawab dalam

ukuran otoritas publik. Pemanfaatan inovasi data juga diharapkan mampu memberikan dukungan yang efektif dan meyakinkan kepada daerah, tentunya ini merupakan kemajuan yang penting. Namun dalam penerapannya tentu tidak sesederhana membalikkan telapak tangan, perlu siklus, waktu, dan tahapan yang konstan. Pemanfaatan inovasi data dalam pengembangan lebih lanjut administrasi publik juga memberikan kebebasan yang sangat besar terhadap pergantian peristiwa lokal. Dimana daerah dapat memanfaatkan inovasi data untuk bekerja dengan siklus pendampingan, menyajikan potensi lokal, dan meningkatkan asosiasi dengan daerah dan bisnis lokal.

Penggunaan Inovasi Data dalam rencana pemerintah untuk membantu pelaksanaan administrasi otoritatif yang lebih baik, memiliki opsi untuk memberikan administrasi data yang sesuai kepada mitra. Administrasi digitalisasi pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan web. Misalnya, administrasi keberatan masyarakat berbasis SMS, partisipasi online (e-participation), laporan pelaksanaan SKPD (e-reports), surat menyurat (e-office) yang semuanya tersebar di web utama pemerintah lingkungan, serta dimanfaatkan sebagai peralatan untuk pemeriksaan dan penilaian. eksekusi di dalam otoritas publik.

Salah satu pemanfaatan inovasi data adalah pemanfaatan aplikasi eksekusi bantuan yang handal, khususnya Kerangka Data Bumdes dan Dewan Desa dan Desa yang didistribusikan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sidrap sebagai tim dengan Desa dan Kecamatan di Rezim Sidenreng Rappang, salah satunya adalah Desa Pinanong. Kerangka Data Bumdes dan Desa dan Desa Aplikasi Kerangka Data Eksekutif akan menjadi aplikasi yang membantu pemenuhan kebutuhan dan upaya untuk mengharapakan perubahan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan inovasi, khususnya pemanfaatan inovasi data untuk organisasi pemerintah Desa Pinanong. Pemanfaatan aplikasi ini, khususnya data dan kerangka kerja eksekutif, akan membantu alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan mereka dengan mengurangi batasan mereka.

Penyempurnaan kerangka data administrasi melalui pemanfaatan Kerangka Data Bumdes dan Desa dan Desa Para eksekutif akan mendorong perubahan besar

dalam contoh administrasi publik yang diselesaikan oleh dewan baik di tingkat fungsional (pelaksana khusus) dan perintis di semua tingkat. Kemajuan ini juga telah mendorong perubahan dalam pekerjaan direktur secara dinamis, mereka dituntut untuk selalu memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang paling tepat dan mutakhir yang dapat digunakan dalam siklus dinamis terkait dengan masalah publik termasuk administrasi.

Hardiyansah (2017:11) mencirikan bahwa "administrasi dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang diberikan untuk membantu, bersiap-siap, dan mengawasi apakah sebagai tenaga kerja dan produk dimulai dengan satu pihak kemudian ke pihak berikutnya. Pemerintah daerah dapat diatur sebagai berhasil jika daerah mendapat pendampingan sederhana dengan metodologi yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Tercapainya perluasan kecukupan administrasi publik ditentukan oleh kapasitas otoritas publik untuk lebih mengembangkan disiplin kerja fakultas administrasi. Secara khusus, Pinanong Pemerintah Desa diperlukan untuk mengakui administrasi yang menarik melalui penggunaan Kerangka Data Bumdes dan Dewan Desa dan Desa dalam mencapai administrasi, yang berarti bahwa individu saat ini tidak memerlukan kantor.

Berdasarkan persepsi yang kami buat pada tanggal 20 September 2020, sebenarnya masalah bantuan masyarakat tergantung pada pertemuan yang kami pimpin dengan daerah, khususnya administrasi dan prolog pembuatan Kartu Karakter (KTP), Jual Beli Tanah dan Akta Beli, dan catatan sanksi, rasanya masih kusut dan liar. Agaknya, ketidakprofesionalan perwakilan dalam menjalankan kewajibannya, misalnya datang tepat waktu dan pulang lebih awal membuat pendampingan menjadi lambat. Dengan demikian, pemanfaatan Kerangka Data Bumdes dan Dewan Desa dan Desa dapat membantu staf/perwakilan dalam melayani daerah. Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka penulis akan meneliti tentang Penerapan aplikasi Sistem Informasi Bumdes dan Manajaemen Kelurahan dan Desa terhadap pelayanan publik Kantor Desa Pinanong Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sistem Informasi Pemerintahan Bumdes dan Desa berupa sistem informasi komputer

yang tujuannya berguna dalam pengambilan keputusan manajemen yang meliputi keputusan rutin dan keputusan strategis. Sebagaimana dikemukakan oleh Asri Siahaan (2009) dalam Firman Alandari (2013), kegunaan/fungsi SIM adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas data yang disajikan kepada pengguna secara tepat waktu dan akurat, tanpa perlu kehadiran agen sistem informasi;
2. Menjamin ketersediaan kualitas dan kapabilitas dalam penggunaan kritis sistem informasi;
3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif;
4. Mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi;
5. Menentukan investasi yang akan diarahkan ke dalam sistem informasi;
6. Mengantisipasi dan memahami dampak ekonomi dari sistem dan teknologi informasi baru;
7. Meningkatkan produktivitas pengembangan aplikasi dan pemeliharaan sistem.

Sinambela (2014:5) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Tentu saja negara didirikan oleh publik (masyarakat) untuk mengembangkan kepentingan bersama. Pada hakekatnya dalam hal ini pemerintah (birokrat) harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini persoalannya bukan individual. kebutuhan, tetapi tentang berbagai kebutuhan yang sangat diharapkan masyarakat, misalnya kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Sinambela (2014:5) merekomendasikan lima hal terpenting yang harus diperhatikan pemerintah dalam memberikan layanan:

1. Keandalan yang ditandai dengan pemberian layanan yang tepat dan benar.
2. Aset berwujud ditandai dengan penyediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang memadai.
3. Responsiveness yang ditandai dengan keinginan untuk melayani konsumen dengan cepat.
4. Keamanan, yang ditentukan oleh tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam pemberian pelayanan.
5. Empati, ditentukan oleh kesediaan konsumen untuk mengetahui keinginan dan kebutuhannya.

B. METODE PENELITIAN

Teknik pemeriksaan dalam eksplorasi ini adalah strategi pemeriksaan kuantitatif yang mencerahkan. Dalam pemeriksaan ini populasi adalah jumlah individu yang telah dilayani selama 2 bulan terakhir, maka pada bulan September-Desember 2020 yaitu 85 individu, contoh dilakukan agar semua individu dari populasi memiliki kebebasan yang sama untuk mengikuti tes. Jumlah tes hingga 85 orang. Prosedur pengumpulan informasi digunakan melalui persepsi, wawancara, survei tertulis dan polling. Sedangkan strategi investigasi informasi melalui tahapan kesiapan, reklamasi, dan penggunaan informasi sesuai pendekatan pemeriksaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi akses data di Kantor Desa Cipotakari tergolong buruk dengan skor 47,4%. Administrasi publik diperintahkan sejauh pilihan pemerintah atau pilihan untuk menawarkan jenis bantuan yang diterima untuk secara jelas mempengaruhi kehidupan individu. Bantuan publik terkadang menyinggung gagasan untuk memperjelas pilihan kegiatan bantuan tertentu yang sama sekali berbeda atau eksplisit, misalnya dalam bidang tertentu seperti memberikan data. Dengan pemanfaatan inovasi data sebagai bagian dari pemerintahan dan kebutuhan untuk mendapatkan data yang tepat dan cepat, kemajuan teknologi data dimanfaatkan sebagai bisnis ganda dari organisasi web, yang memungkinkan individu untuk berbagi dan memperoleh informasi yang dapat diakses. melalui organisasi. Globalisasi dan masa inovasi semakin mendorong kebutuhan akan data yang cepat dan tepat, yang sangat vital bagi individu di berbagai bidang.

Ketiadaan data daerah terkadang menimbulkan gangguan administrasi, di samping tidak adanya data daerah menjadi bingung tentang administrasi apa yang disajikan oleh Kantor Desa Cipotakari. Kemampuan perangkat Kantor Desa Cipotakari dalam memanfaatkan aplikasi Bumdes Data Framework tergolong kurang baik dengan skor 55%. Kemampuan Pemanfaatan inovasi data dan surat menyurat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia saat ini. Berbagai bagian kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh kemajuan inovasi data dan korespondensi. Selain itu, inovasi data dan korespondensi

dapat memperkenalkan waktu lain perkembangan manusia, dari zaman modern ke zaman data. Aplikasi Bumdes Data Framework merupakan aplikasi yang membantu menjawab permasalahan dan upaya untuk mengantisipasi perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, khususnya pemanfaatan inovasi data untuk organisasi pemerintahan Desa Cipotakari. Menggunakan aplikasi ini, terutama data dan kerangka kerja papan, akan membantu perangkat menjalankan tugasnya dengan mengurangi batasannya. Jadi jika aplikasi ini digunakan secara salah atau tidak tepat, Desa Cipotakari akan berubah menjadi Desa yang ketinggalan jaman.

Pemanfaatan Aplikasi Data Framework Bumdes di Kantor Desa Cipotakari tergolong baik dengan skor 70,4%. Sebagai aturan, pemanfaatan inovasi data digunakan untuk mengukur, memperoleh, memesan, menyimpan, dan mengontrol informasi secara berbeda, termasuk siklus untuk memberikan data yang berkualitas, tepat, nyaman, dan bertanggung jawab yang melayani intrik publik dan dapat digunakan secara dinamis. Cobalah untuk tidak melakukannya. Tugas media web adalah sebagai substansi sebagai inovasi data yang memungkinkan otoritas publik untuk berkomunikasi secara langsung dengan penghuninya tanpa batasan spasial atau sekilas.

Menggabungkan latihan yang saling terkait seperti pemanfaatan inovasi data, penanganan informasi, data para eksekutif dan kerangka kerja dewan melalui aplikasi kerangka data Bumdes di kantor Desa Cipotakari. Dipercaya bahwa peningkatan inovasi data dan penggunaan jaringan web untuk pemerintah dapat mengatasi berbagai masalah dengan meningkatkan efektivitas, pengembangan, kegunaan, peningkatan akses, dan penghematan biaya. Pemanfaatan inovasi data dengan kerangka data Bumdes di Kantor Desa Cipotakari untuk lebih mengembangkan administrasi publik juga menawarkan kebebasan yang sangat besar untuk pergantian wilayah. Dimana lokal dapat memanfaatkan inovasi data untuk bekerja dengan siklus bantuan, memajukan potensi wilayah dan meningkatkan asosiasi dengan wilayah dan ekonomi lokal. Menawarkan jenis bantuan publik yang besar adalah tujuan dari setiap pemerintah lingkungan. Pemerintah daerah saat ini sedang berjuang untuk

menerapkan dan menggunakan pendorong dalam inovasi data untuk mewujudkannya.

Keefektifan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Bumdes di Kantor Desa Cipotakari dikategorikan baik dengan nilai 66,2%. Aparatur Sipil Negara bisa dibilang merupakan bagian penting dari setiap sistem pemerintahan, karena dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Tanpa pelayanan publik yang baik, peluang masyarakat untuk hidup sejahtera akan sangat terbatas. Dengan adanya aplikasi sistem informasi Bumdes di Kantor Desa Cipotakari, teknologi informasi dinilai paling efektif. Perannya adalah menyajikan data yang akurat dan konsisten dengan data di lapangan. Data-data yang diperoleh nantinya dapat dengan mudah diintegrasikan, apalagi dengan adanya data-data penting dan inovasi teknologi yang seharusnya memudahkan kehidupan manusia. Begitu pula dengan inovasi di bidang teknologi informasi. Orang tidak harus melalui prosedur tradisional yang rumit seperti dulu. Dengan demikian, utilitas lebih optimal dan efisien.

Keamanan data dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Bumdes di Kantor Desa Cipotakari dikategorikan baik dengan nilai 67%. Fakta bahwa nilai informasi sangat penting berarti hanya orang-orang tertentu yang dapat memperoleh informasi yang Anda inginkan. Menerima informasi kepada pihak lain dapat merugikan pemilik informasi tersebut. Pengamanan aplikasi sistem informasi Bumdes di Kantor Desa Cipotakari merupakan sistem perlindungan terhadap gangguan dan segala ancaman yang merugikan, dalam hal ini pengamanan meliputi keamanan data atau informasi atau pelaku sistem (pengguna). Adalah baik untuk menghindari ancaman eksternal dan virus. Spyware, tangan pengguna lain yang tidak mengetahui informasi, dll. Sistem komputer berisi data dan informasi yang berharga, dan penting bagi sistem operasi untuk melindungi data ini dari orang yang tidak berwenang. Sistem operasi memiliki beberapa masalah keamanan yang terkait dengan kehilangan data. Sistem komputer dan data yang dikandungnya terancam oleh ancaman (threats), penyusup (attack), dan bencana.

Pemahaman masyarakat dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Bumdes di Kantor Desa Cipotakari dikategorikan kurang baik dengan nilai 57,8%.

Masyarakat informasi umumnya digunakan untuk menggambarkan masyarakat dan ekonomi yang menggunakan fasilitas teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari dengan intensitas tinggi. Komunitas-komunitas ini menggunakan teknologi yang sama atau kompatibel untuk berbagai kegiatan pribadi, sosial, pendidikan dan komersial, bahkan untuk mengisi waktu luang mereka. Teknologi ini dapat dengan cepat mengirim, menerima, dan bertukar data digital antar lokasi, terlepas dari jarak.

Pengerjaan data framework Bumdes di Kantor Desa Cipotakari merupakan langkah maju bagi masyarakat Cipotakari untuk berubah menjadi data society atau manusia masa kini. Orang-orang saat ini tidak dapat dipisahkan dari inovasi data dengan terhubung dengan latihan sehari-hari mereka melalui catatan surat, email, dan jaringan dunia maya. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa penanganan data adalah pusat latihan manusia saat ini yang memanfaatkan kemajuan baru.

Absennya penataan publik berasal dari masuknya data yang diidentikkan dengan inovasi yang jarang dikunjungi masyarakat umum. Kebutuhan akan data dalam kehidupan individu sangat tinggi, baik untuk kolaborasi di antara orang-orang maupun untuk membantu berbagai latihan seperti latihan bisnis, latihan sosial, pendidikan, dan latihan administrasi. Aset yang disiapkan dalam masyarakat data adalah data sebagai transmisi informasi dan PC. Aset yang dibutuhkan saat ini adalah informasi, dengan tujuan dibutuhkan SDM yang berkualitas, untuk menjadi pekerja berbakat tertentu. Masyarakat data membutuhkan inovasi cerdas melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Dukungan aplikasi Bumdes Data Framework di Kantor Desa Cipotakari tergolong kurang baik dengan skor 57%. Pengembangan Kerangka Data Bumdes di Kantor Desa Cipotakari telah mengubah cara pengawasan administrasi perawatan. Kerangka data ini berisi banyak data pendukung informasi, termasuk riwayat pemeliharaan, pencatatan biaya dukungan, dan mengikuti data yang berlaku seperti penyebab masalah, yang semuanya menambah administrasi produktif. Kumpulan yang disiapkan dalam kegiatan kerangka data ini jelas dapat memanfaatkan semua kapasitas yang dapat diakses dengan tujuan

agar aksesibilitas data dapat tertutup sepenuhnya. Kerangka kerja ini juga memberikan data tentang pengulangan administrasi kantor. Aksesibilitas data ini mendorong efektivitas. Sejauh mana kontrol aplikasi mengambil bagian dalam menjauhkan dan mengenali kesalahan.

Sebuah tes dianggap bermanfaat jika kesalahan dapat dibatasi. Betapa pentingnya data dalam keberadaan manusia sehingga mendekati data tidak terlambat, tidak memihak, bebas kesalahan dan relevan dengan kliennya, sehingga data tersebut menjadi data yang berkualitas dan bermanfaat bagi kliennya. Pemeliharaan lengkap atau perombakan lebih lanjut mengembangkan tugas atau daya dukung. Ini juga menjamin bahwa kerangka kerja memenuhi prasyarat klien yang sudah tidak jelas. Jika terjadi perubahan besar pada modul, staf pemeliharaan juga memiliki pilihan untuk melakukan perbaikan kode, mengganti cabang lama, memperbaiki kekacauan, dan mengembangkan dokumentasi lebih lanjut. Latihan pemeliharaan ini dapat mencakup konfigurasi ulang atau pembuatan ulang pemrograman, pengerjaan ulang arsip, pengaturan laporan dan perubahan konten, mengenali alasan penanganan yang lebih produktif, dan mengembangkan lebih lanjut efektivitas fungsional gadget.

Ketepatan administrasi dengan aplikasi Bumdes Data Framework di Kantor Desa Cipotakari tergolong baik, dengan skor 61,6%. Bantuan publik selalu dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang atau pertemuan atau lembaga tertentu yang sepenuhnya bermaksud membantu dan bekerja dengan daerah setempat untuk mencapai tujuan tertentu. Bantuan publik ini menjadi semakin signifikan karena selalu berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas dengan berbagai kepentingan dan tujuan. Untuk mewujudkan administrasi terbuka yang baik, Pemkot Cipotakari mensyaratkan jumlah dan sifat fakultas/perangkat keras yang dapat diakses memadai dan memiliki bantuan publik yang lebih baik dari rata-rata sehingga administrasi terbuka dapat berjalan lancar dan on track. Organisasi dapat membawa Anda lebih dekat dengan masyarakat.

Sifat kerja perangkat Kantor Desa Cipotakari dengan memanfaatkan aplikasi Bumdes Data Framework tergolong kurang baik dengan skor 56%. Ini adalah kewajiban semua kantor administrasi untuk bekerja

dengan baik untuk individu. Oleh karena itu, setiap alat dalam organisasi administrasi harus melayani daerah dan mencari cara untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk melayani. Kemampuan administrasi mencakup kewenangan informasi tentang administrasi yang diberikan, karena hal ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa perangkat dalam organisasi pemerintahan tersebut cakap dalam bidang bantuan masyarakat kepada para eksekutif.

Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Bumdes memiliki fungsi yang mendasar, yaitu komunikasi merupakan sarana untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah dan mengambil keputusan. Hal ini juga digunakan untuk mengekspresikan ekspresi emosional. Ekspresi ekspresi emosional sangat penting dalam organisasi dan meskipun dimungkinkan untuk muncul sepenuhnya dalam situasi tertentu, itu adalah cara untuk menciptakan pemahaman yang lebih efektif antar individu. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat kontrol dalam arti teknologi komunikasi dapat membantu mengontrol perilaku perangkat.

Kecepatan pelayanan di Kantor Desa Cipotakari dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Bumdes dikategorikan baik nilai 67,2%. Tuntutan peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan bagi masyarakat merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah harus mampu mengubah pelayanan publik yang buruk menjadi lebih baik. Peningkatan kinerja dapat dicapai melalui fasilitas yang digunakan, antara lain penggunaan aplikasi Sistem Informasi Bumdes. Seorang yang profesional, yaitu pegawai Kantor Desa Pinan yang bekerja di kepegawaian, harus menguasai kebutuhan masyarakat dan mengetahui bagaimana memenuhi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dengan profesionalisme yang meningkat, pengaduan masyarakat terhadap pemerintah, pelayanan juga menghilang di aparat lembaga negara untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Seperti slogan terkenal "Anda Puas, Kami Puas", proses pelayanannya cepat, mudah, tepat dan disertai dengan sikap ramah yang diharapkan masyarakat. Jika pelayanan yang diberikan seperti ini, masyarakat akan puas dan senang.

Kesopanan aparatur dalam pelayanan di Kantor Desa Cipotakari dikategorikan baik nilai 70%. Pentingnya pelayanan ini tidak

lepas dari efek yang timbul dari kesan atau persepsi yang timbul dalam kontak langsung dengan masyarakat. Hal yang nyata secara sosial adalah nilai-nilai etika dalam pemberian jasa oleh penyedia jasa. Etika sering juga disebut sebagai perbuatan yang mengatur tingkah laku manusia atau tingkah laku dalam masyarakat. Perilaku tersebut harus diatur sedemikian rupa agar tidak melanggar norma atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Hal ini karena norma atau kebiasaan masyarakat berbeda. Moral yang baik dari staf Kantor Desa Pinnong dalam memberikan pelayanan dipengaruhi oleh faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Orang yang melayani masyarakat harus mampu melayani dengan tepat dan cepat. Selain itu, perangkat harus komunikatif, santun, ramah, bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat, serta memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik untuk memahami kebutuhan masyarakat.

Pengetahuan aparatur di Kantor Desa Cipotakari dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Bumdes dikategorikan baik dengan nilai 64,8%. Manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Ilmu manajemen, sering disebut manajemen sumber daya manusia atau manajemen administrasi, diperlukan untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia sedemikian rupa untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi institusi. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pemerintah telah mengembangkan konsep digital government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan elektronik atau yang dikenal dengan electronic government (e-gov). Pemerintah menggunakan teknologi berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan layanannya. Fungsinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan merespon perubahan kebutuhan secara efektif.

Penerapan aplikasi Sistem Informasi Bumdes terhadap pelayanan publik Kantor Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan kurang baik dengan nilai 55,23%. Berlokasi di Kantor Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Sistem Informasi Bumdes dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang

menyediakan informasi di semua tingkatan dalam organisasi pada saat dibutuhkan. Sistem ini menyimpan, menerima, mengubah, mengelola, dan mengirimkan informasi yang diterima menggunakan sistem informasi atau perangkat sistem lainnya.

Manajemen adalah kegiatan administrasi yang meliputi pencatatan, surat menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat, serta aspek lain dalam memberikan informasi dan memfasilitasi re-informasi bila diperlukan. Ini tentang kependudukan, jumlah, konstitusi, usia, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, distribusi, mobilitas dan kualitas dan ketahanan dalam hal politik, ekonomi, sosial dan budaya. Saat ini sulit/tidak mudah mendapatkan data dari suatu desa, data penting untuk menghasilkan informasi yang relevan dan bermanfaat, pendataan desa menjadi informasi desa, data tersebut meliputi data kependudukan, data keluarga dan data lainnya. Untuk mendukung pembangunan dan pembangunan desa, diperlukan suatu alat yang dapat mengelola informasi di desa secara terorganisir dan menghasilkan data yang mudah diperoleh/digunakan. Dengan cara ini dapat berkontribusi pada pembangunan desa dan memberikan informasi di desa.

Pada sistem pengabdian masyarakat ini dikarenakan aplikasi Sistem Informasi Bumdes di Kantor Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sebelumnya belum menggunakan pendataan kependudukan dan pencatatan kependudukan berupa pendataan atau laporan pelayanan publik belum dimanfaatkan secara maksimal. Banyak kejadian seperti kelahiran, kematian, pemindahan data kependudukan, kedatangan data kependudukan tidak akan dapat terorganisasi dengan baik bahkan untuk penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran, dan permasalahan yang ada adalah database kependudukan tidak ada di database kependudukan. tujuan lain yang pada dasarnya setiap tahun. Informasi yang diperoleh berasal dari data kependudukan dari departemen pemerintah dan berhubungan langsung dengan masyarakat serta menjadi benchmark bagi departemen lain, karena arsip-arsip penting seringkali hilang pada sistem yang lama. Data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat seringkali terlambat sehingga pelayanannya kurang baik dan optimal. Melalui aplikasi Sistem Informasi

Bumdes di Kantor Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan pemerintah desa dapat dengan mudah mengelola informasi kegiatan desa bagi warga dan mempermudah akses bagi warga. Kantor desa dapat menggunakannya untuk mengelola informasi perencanaan pembangunan desa, misalnya. Selain itu, dapat digunakan di berbagai media seperti papan pengumuman, website desa, dll. Juga dapat menampilkan informasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan Penerapan aplikasi Sistem Informasi Bumdes terhadap pelayanan publik Kantor Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan kurang baik dengan nilai 60,11%. Akibat karena kurangnya pemanfaatan tentang aplikasi Sistem Informasi Bumdes di Kantor Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yang hingga saat ini pendataan kependudukan dan pencatatan sipil yang berupa data atau laporan belum dapat secara maksimal didayagunakan untuk pelayanan publik. Akan banyak sekali peristiwa seperti informasi layanan, kelahiran, kematian, data penduduk pindah, dan data penduduk datang dan lain-lain akan tidak tertata secara benar.

E. REEFERENSI

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Gava Media : Yogyakarta.
- Afandi, P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing
- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary, (Penerjemah). 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Satu. Yogyakarta : ANDI
- Djahir dan S. M. Dewi Pratita. 2015. *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Firman Alandari . 2013. *Peran Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Berau*. eJournal Ilmu Pemerintahan: 182-194 ISSN 0000-0000.
- Hasibuan, Malayu. 2014 . *Manajemen Sumber Daya manusia*. Bumi Aksara Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta
- Hardiyansah, .2017. *Sistem informasi koperasi berbasis web (studi kasus koperasi kedaung sejahtera enambelas*. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.
- Hirin, A. M. & Virgi. 2011. *Cepat Mahir Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL (Level dasar sampai mahir)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Hutahaean. 2015. *Konsep Sistem Informasi*. Deepublish. Yogyakarta
- Israwaty Akhmad, Ahmad Mustanir, Muhammad Rohady Ramadhan. 2018. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang*. Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyiah (APPPTMA)
- Kadir. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Andi.Yogyakarta.
- Krismiaji, 2015, *Sistem Informasi Akuntansi*. Unit Penerbit. Yogyakarta.
- Laudon, Kenneth C, dan Jane P. Laudon,. 2008). *Sistem Informasi Manajemen*;

Mengelola Perusahaan Digital”,
(Terjemahan Chriswan Sungkono dan
Machmudin Eka P), Edisi 10. Salemba
Empat. Jakarta

Lipursari, Anastasia. 2018. Peran Sistem
Manajemen Informasi (SIM) dalam
Pengambilan Keputusan. Jurnal STIE
Semarang. Vol 5. NO 1. ISSN : 2252-
7826.

McLeod Jr, Raymod dan George P Schell.
2008. Sistem Informasi Manajemen
Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat

Moenir. 2015, Manajemen Pelayanan Umum
Di Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Mulyani, Sri. 2016. Sistem Informasi
Manajemen. Bandung: Abdi
Sistematika.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Teori Budaya
Organisasi. Cetakan Kedua. Jakarta;.
Rineka Cipta.

Romney, Marshall B. dan Steinbart,. 2015).
Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13,
alih bahasa: Kikin Sakinah Nur Safira
dan Novita Puspasari, Salemba Empat.
Jakarta.

Sinambela, Litjan Poltak, dkk. 2014.
Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta :
PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
Administrasi. Alfabeta : Bandung

Sukamto, Rosa., M.Shalahuddin. 2015.
Rekayasa Perangkat Lunak Struktur
dan Berorientasi Objek. Bandung :
Informatika.